



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Vokasi
Program Studi D4 Administrasi Negara**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																	
Administrasi Pemerintahan Daerah	6330102057		T=1 P=1 ECTS=3.18	5	4 Juli 2023																																	
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																			
	Agus Prastyawan	Prasetyo Isbandono	Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																					
	CPMK - 1	Mampu merumuskan alternatif solusi permasalahan tata kelola pemerintahan di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.																																				
	Matrik CPL - CPMK																																					
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td colspan="16"></td> </tr> </table>				CPMK																	CPMK-1															
CPMK																																						
CPMK-1																																						
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																						
	CPMK	Minggu Ke																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																					
	CPMK-1																																					
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah mengantar pemahaman mahasiswa akan pengertian Sistem Otonomi, Pengertian Pemerintah Daerah, konsep-konsep yang mendasari pembentukan Pemerintahan Daerah, yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, local government dan wilayah administrasi, administrasi pemerintahan daerah dan birokrasi lokal, hubungan serta kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, cara penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, koordinasi antar pemerintah daerah, perencanaan keuangan daerah sampai pada pertanggung-jawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hubungan antara kepala daerah dengan DPRD, instansi vertikal pada pemerintah daerah, perencanaan-pelaksanaan-evaluasi kebijakan, fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pada akhirnya sampai pada pengawasan internal-eksternal baik dari sisi politik, masyarakat dan oleh lembaga peradilan.																																					
Pustaka	Utama :																																					
	<ol style="list-style-type: none"> Smith, Kevin B. 2014. State and Local Government. SAGE Publica Lions (Asia Pasific) Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 																																					
	Pendukung :																																					
	<ol style="list-style-type: none"> Affudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu Rosenbloom David H & Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill Smith, Kevin B. 2014. Governing States and Localities. SAGE Publication Ltd 																																					
Dosen Pengampu	Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA.																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																															
1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian otonomi daerah dan pemerintah daerah	Menjelaskan system otonomi daerah dan dasar pembentukan pemerintah daerah	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah mimbarTanya jawab. Diskusi. 2 X 50		Materi: otonomi daerah dan pemerintah daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	5%																															

2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah 3. Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah mimbar/Tanya jawab. Diskusi 2 X 50		Materi: Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah 3. Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Kuliah mimbar/Tanya jawab. Diskusi 2 X 50		Materi: Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Mengidentifikasi aktor birokrasi lokal Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif		Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50	Materi: Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif		Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50	Materi: Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%

6	Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan 2. Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan 3. Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50		Materi: Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan Pustaka: Rosenbloom David H & Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill <hr/> Materi: Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.	5%
7	Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan 2. Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan 3. Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja	Kuliah mimbar/Diskusi/Simulasi 2 x 50		Materi: Menjelaskan persyaratan penyerahan kewenangan Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan Pustaka: Rosenbloom David H & Kravichuk Robert S 2005 Public Administration Understanding Management Politics and Law in the public Sector Mc Graw Hill <hr/> Materi: Mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja-sama Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.	5%

8	<p>1. Bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan dengan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut</p> <p>2. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil informasi dan analisis data</p>		<p>Kriteria: Soal no.1 skor :20 Soal no.2 skor :20 Soal no.3 skor :20 Soal no.4 skor :40</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes tertulis 2 x 50		<p>Materi: semua materi yang telah diberikan Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan daerah	<p>1. Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah</p>	<p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio</p>	presentasi, diskusi 2 X 50		<p>Materi: Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan daerah	<p>1. Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah</p>	<p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio</p>	presentasi, diskusi 2 X 50		<p>Materi: Menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi factor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%

11	Menjelaskan peranan masing-masing Lembaga Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menjelaskan antara hubungan kepala daerah dengan DPRD 2.Menganalisis pola hubungan instansi vertikal pada pemerintah daerah 3.Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pola hubungan tersebut 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	presentasi. diskusi 2 X 50		Materi: Menjelaskan antara hubungan kepala daerah dengan DPRD Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menganalisis pola hubungan instansi vertikal pada pemerintah daerah Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk kebijakan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut. 2.Menganalisis dasar pengambilan kebijakan 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	presentasi - Diskusi 2 X 50		Materi: Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut. Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut. Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah. 2.Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah. 3.Mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan. 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Kuliah mimbarDiskusi Simulasi 2 X 50	Materi: Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah. Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah. Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah. 2.Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah. 3.Mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan. 	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Kuliah mimbarDiskusi Simulasi 2 X 50	Materi: Menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah. Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <hr/> Materi: Menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah. Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu	5%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	<p>1. Menjelaskan prosedur pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah</p> <p>2. Menganalisis mekanisme pengawasan oleh masyarakat</p>	<p>Bentuk Penilaian :</p> <p>Aktifitas Partisipatif</p>		Kuliah mimbar Diskusi Simulasi 2 X 50	<p>Materi: Menjelaskan prosedur pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah</p> <p>Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p>Materi: Menganalisis mekanisme pengawasan oleh masyarakat</p> <p>Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p>	5%
16	<p>1. Sub-CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian otonomi daerah dan pemerintah daerah</p> <p>2. Sub-CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Sub-CPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>4. Sub-CPMK4 Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah</p> <p>5. Sub-CPMK5 Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah</p> <p>6. Sub-CPMK6 Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.</p> <p>7. Sub-CPMK7 Menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.</p> <p>8. Sub-CPMK8 Sub-CPMK9 Mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan daerah</p> <p>9. Sub-CPMK10 Mahasiswa</p>	Mahasiswa mampu menyajikan best practice pelaksanaan pelayanan publik dalam kerangka pemda	<p>Kriteria:</p> <p>Skor soal no.1 : 20 Skor soal no.2 : 20 Skor soal no.3 : 20 Skor soal no.4 : 40</p> <p>Bentuk Penilaian :</p> <p>Tes</p>	Tes Tertulis 2 X 50		<p>Materi: semua materi yang telah diberikan</p> <p>Pustaka: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <hr/> <p>Materi: semua materi yang telah diberikan</p> <p>Pustaka: Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia. Edisi Revisi Yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.</p> <hr/> <p>Materi: semua materi yang telah diberikan</p> <p>Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu</p>	14%

mampu menjelaskan kewenangan daerah						
10.Sub-CPMK11 Menjelaskan peranan masing-masing Lembaga Pemerintahan Daerah						
11.Sub-CPMK11 Menjelaskan peranan masing-masing Lembaga Pemerintahan Daerah						
12.Sub-CPMK12 Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk kebijakan daerah						
13.Sub-CPMK13 Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah						
14.Sub-CPMK14 Mahasiswa mampu menjelaskan Pelayanan Pemerintahan Daerah						
15.Sub-CPMK15 Mahasiswa mampu menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah						

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	51.68%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	8.34%
3.	Penilaian Portofolio	6.68%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	3.34%
5.	Tes	29%
		99.04%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

